

# **PENELITIAN ETNOGRAFI DIBALIK PENCEGAHAN KONFLIK DAN AFFIRMATIVE ACTION PERLINDUNGAN KEKAYAAN BUDAYA: MEMAHAMI SEBUAH HIBRIDITAS KEBUDAYAAN**

## **ETHNOGRAPHY RESEARCH IN PREVENTION OF CONFLICT AND AFFIRMATIVE ACTION OF CULTURAL PROPERTY PROTECTION: UNDERSTANDING A CULTURAL HYBRIDITY**

M. Alie Humaedi

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI  
humaedi2014@gmail.com

### **Abstrak**

Konflik suku dan agama menjadi isu hangat dunia penelitian. Beragam pendekatan digunakan untuk memotret masalah, aktor, dan penyebab yang bisa diuraikan untuk meredakan konflik. Sayangnya, banyak penelitian yang hanya menampilkan aspek permukaan, sehingga penyelesaiannya bersifat artifisial dan tidak kontekstual. Aspek kebudayaan dan kebahasaan terkait konflik, sebagai modal terpenting dalam penyelesaian konflik, kurang dilihat secara komprehensif. Di sisi lain, bahasa dan budaya daerah hanya dimaknai sebagai khazanah kebudayaan yang berorientasi pengembangan pariwisata saja. Upaya yang dilakukan pemerintah dan berbagai pihak baru sebatas pada pendokumentasian bahasa dan kekayaan budaya saja. Penelitian yang mampu mengungkap nilai dan praktik kebudayaan berbagai kelompok suku bangsa belum banyak menjadi media langkah strategis dalam mitigasi konflik. Pertanyaannya, bagaimana penelitian dan perspektif etnografi dapat berperan dalam upaya peredaman konflik dan afirmasi bagi upaya perlindungan kekayaan budaya daerah? Tulisan ini merupakan refleksi berbagai penelitian terkait bahasa dan budaya yang dilakukan oleh LIPI dan lembaga lain. Keterlibatan penulis dalam dunia penelitian etnografi bahasa dan budaya menjadi aspek penting refleksinya. Tulisan ini menjelaskan perkembangan dan kecenderungan penelitian kebudayaan di LIPI dan lembaga lain. Selain itu, penelitian etnografi budaya dan bahasa dilihat tidak hanya berdampak pada upaya perlindungan kekayaan budaya berbagai suku bangsa, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam peredaman konflik dan peneguhan kebangsaan.

**Kata kunci:** etnografi, mitigasi konflik, perlindungan budaya, hibriditas

### **Abstract**

*Tribal and religious conflicts are becoming a hot issue of the research world. Various approaches are used to describe problems, actors, and causes that can be deciphered to quell conflicts. Unfortunately, many studies show only surface aspects, so the solution is artificial and non-contextual. The cultural and linguistic aspects of the conflict, the most important capital in conflict resolution, are less than comprehensive. On the other hand, the local language and culture is only interpreted as a cultural treasure for tourism development only. There has been no maximum effort in encouraging culture and language along with its hybridity process as the most important strategy of conflict mitigation. Research which able to reveal the values and cultural practices of various ethnic groups has not been a major medium for the strategic paradigm. The question is, how can ethnographic research and perspectives play a role in the efforts to conflicts mitigation and affirmations for the protection of local cultural wealth? This paper reflects the various researches related to language and culture conducted by LIPI and other institutions. The involvement of writers in the world of ethnographic research of language and culture becomes an important aspect of his reflection. This writing explained the development and tendency of cultural research in LIPI and other institutions. In addition, cultural and linguistic ethnographic research viewed not only affects the protection of cultural wealth of various ethnic groups, but also a strategic effort in the reduction of conflict and affirmation of nationality.*

**Keywords:** ethnography, conflict mitigation, cultural protection, hybridity

### **Pendahuluan**

Salah satu kekuatan bangsa Indonesia ditengah pergaulan dunia adalah kekayaan kebudayaan yang dimiliki oleh ratusan suku

bangsanya. Kekuatan itu menjadi sangat luar biasa, ketika masyarakat dan negaranya kemudian berniat dan mengikhtiarkan dirinya untuk hidup bersama, toleran, dan mengedepankan harmoni antara satu dengan lainnya. *Stereotyping* terhadap

suku bangsa tertentu memang ada, etnosentrisme juga kadang muncul saat pergaulan terjadi, dan konflik Suku Agama dan Ras (SARA) juga beberapa kali tampak ke permukaan. Namun, dibandingkan dengan keragaman suku bangsa yang sangat tinggi, di mana ada 650 suku bangsa dan 750 bahasa (Patji, 2014), puluhan kepercayaan lokal dan enam agama terakui (Mufid dalam Depag, 2012), serta 248 juta jiwa penduduk (BPS, 2017) yang tersebar di antara hamparan 16.056 pulau (KKP, 2017), dan luasan wilayah yang membentang dari Merauke ke Sabang, dan dari Miangas sampai Rote, maka sebagai sebuah bangsa yang besar, sesungguhnya dapat dinyatakan berhasil untuk “menahan diri” dari primordialisme fanatik, baik dari sisi kesukuan, keagamaan, maupun rasial, yang cenderung melahirkan berbagai konflik.

Pertanyaan yang sering muncul adalah kekuatan apa yang mampu menghimpun keragaman suku bangsa dengan berbagai bahasa, budaya, dan agamanya ini ke dalam satu perasaan yang sama tentang kebangsaan? Banyak ilmuwan dan praktisi politik yang menghubungkan kekuatan itu dengan “Kesaktian Pancasila” (Latif dalam Soegiyapranata Institute, 2017). Kesaktiannya didefinisikan sebagai kemampuan menghimpunkan perbedaan dalam satu tujuan yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsepsi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua, menjadi landasan utama dari kesaktian Pancasila ini. Kemampuan itu mencakup nilai-nilai yang dimiliki dan ditransmisikan terus-menerus ke masyarakat bangsa. Sebagai sebuah komunitas warga bangsa yang melek mata karena telah bersentuhan dengan formalitas kebangsaan, pernyataan ini mungkin benar adanya. Namun, masih banyak suku bangsa yang berada di wilayah pedalaman dan pulau-pulau terpencil yang jauh dari formalitas kebangsaan, baik mencakup administrasi kependudukan, layanan kesehatan dan pendidikan, dan apalagi penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Kelompok-kelompok ini masih menahan diri untuk tidak memilih primordialisme fanatik yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Sampai tahun 2012, suku bangsa Tau Taa Vana di pedalaman hutan Dataran Tinggi Bulang Tojo Una-Una tidak mengetahui Pancasila beserta nilai-nilainya. Hal luar biasanya, mereka hanya mengenal nilai-nilai tentang “*givu ada' bayar*”, yang dikenalkan dalam tradisi kerajaan Ternate lima abad sebelumnya (Humaedi, 2017).

Walaupun mereka tidak mengenal Pancasila dan nilai-nilainya, mereka tetap hidup harmonis, menghargai dan melindungi orang yang datang, dan tidak mengganggu transmigran yang menempati tiga desa di tanah ulayatnya. Demikian juga komunitas adat Kafoa di Alor Barat Daya, Alor NTT. Mereka mengenal Indonesia dan formalitas kenegaraannya pada tahun 1970an. Namun, jauh sebelum itu, mereka bisa bergaul akrab dengan orang Pura, Klon, Abui, Kui, dan sebagainya (Patji, 2014). Perkawinan campuran atau lintas suku, mitologi akad darah, beringin persatuan, mesbah suci, dan pasar bersama menjadi bukti otentik kehadiran berbagai komunitas suku bangsa di tanah yang sebelumnya tidak mengenal formalitas kebangsaan (Sudiyono, 2013).

Demikian juga masyarakat yang berada di pulau Yobi, wilayah Biak, Papua. Jauh sebelumnya mereka adalah orang yang tidak mengenal di negara mana mereka tinggal, terlebih untuk mengenal Pancasila dan nilai-nilainya yang ada. Meskipun mereka yang tidak mengenal Pancasila itu kerap dianggap pemerintah sebagai bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), mereka tetap bisa menerima kehadiran orang Jawa yang berdagang keliling, orang Sunda yang membuka warung makan, orang Ambon, dan orang Bugis yang berdagang hasil bumi. Hal ini membuktikan bahwa mereka tahu, sadar, dan bersikap toleran bukan semata karena nilai-nilai Pancasila yang secara formalitas diajarkan dalam dunia pendidikan. Kesadaran dan sikapnya telah hadir jauh sebelum mereka mengenal ideologi Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai kebaikan, menahan diri, keterbukaan, dan toleransi ada dan melekat pada setiap komunitas di wilayah Nusantara ini.

Pertanyaan yang patut diajukan adalah bagaimana cara berbagai kelompok sosial di Indonesia itu menihilkan atau mengeliminasi manifest etnosentrisme, sehingga bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang toleran, dan bangsa yang hidup harmonis? Sayangnya, banyak penelitian ilmu sosial kemanusiaan yang seringkali mengarahkan perhatiannya pada aspek perwujudan manifestasi etnosentrisme dibandingkan pada perwujudan mentalitas harmoni ini, sehingga penelitian seolah memberikan gambaran bahwa bangsa ini dipenuhi dengan kekerasan (Anwar, 2008).

Etnosentrisme diartikan sebagai suatu kecenderungan yang mengganggu kebudayaan

atau sukunya lebih baik dan lebih unggul dibandingkan yang lain, atau sebuah konsepsi tentang kebudayaan atau suku lain dengan memperhadapkannya pada identitas kebudayaan dan kesukuannya sendiri. Etnosentrisme merupakan bentuk dari apa yang disebut dengan *colonial discourse*. *Colonial discourse* sendiri dimaknai sebagai upaya membicarakan, meneliti, dan merepresentasikan kebudayaan orang atau identitas diri orang lokal secara sewenang-wenang (Said, 1993). Meskipun ada kesan hanya sebatas soal identitas, tetapi ada potensi untuk memainkan "produk kultural kolonialisme" pelaku kebudayaan lain.

Jika demikian pengertiannya, salah satu jalan untuk mencegah terjadinya etnosentrisme adalah melalui pengenalan kelompok-kelompok suku bangsa yang lain, dan berusaha memberikan pengalaman hidup bersama dengan mereka. Secara metodologi, pengenalan terhadap nilai-nilai dan praktik kehidupan suku bangsa ini akan menjadi objek material, aspek, dan pendekatan terpenting dari etnografi. Dalam prosesnya, pengenalan dan pembauran akibat pertemuan dan pengalaman bersama itu tidak mesti harus menghilangkan identitas aslinya, baik yang dilakukan oleh peneliti ataupun masyarakat umum. Pembauran yang ada bersifat ambang batas kebudayaan, ketika diri (*self*) mengakui kehadiran yang lain (*other*), dan yang lain juga mengakui kehadiran dirinya. Konsepsi ambang batas kebudayaan ini selaras dengan konsepsi tentang hibriditas kebudayaan yang dikenalkan oleh Bourdieu (1993), dan dikembangkan para ilmuwan sosial lainnya.

Hibriditas dimaknai sebagai suatu proses pertemuan silang budaya yang menghasilkan ambang kebudayaan yang tidak pernah jelas batasnya. Keseluruhan proses tersebut, hidup dan dihidupi oleh jejaring kebudayaan yang saling melengkapi. Ambang batas kebudayaan seperti inilah apa yang dimaksud Boudrialliard (1998), Bourdieu (1993), dan Hasan Hanafi (2000) tentang makna *hybrid*, ketika kesadaran kebudayaan diri (*the self* atau *al-ana*) larut marut dalam kebudayaan lain (*the other* atau *al-akhar*). Konsepsinya juga dibangun bahwa *al-akhar* sangat sulit merepresentasikan secara utuh jejaring kebudayaannya, karena harus dan terus menerus berhadapan dengan kesadaran *al-anani* yang lain. Belum lagi ditambah oleh adanya tuntutan menentukan posisi yang skematis dari kesadaran kebudayaan diri (*al-anani*) itu ketika berada di tengah entitas kebudayaan lain (*hum*,

*hiya, they*) sebagai elemen pemengaruh yang kehadirannya tidak kalah penting dengan *al-akhar* itu sendiri. Menurut Hasan Hanafi (2000), pembentukan kesadaran yang memperhadapkan budaya *al-ana* dan *al-akhar* itu berlangsung dalam proses historis dari masyarakat pelaku.

Kesadaran di atas mengingatkan pada gagasan Sartre (dalam Hasan 2007) tentang kebebasan absolut, yaitu suatu bentuk peniadaan diri terhadap definisi diri orang lain. Sartre menyimpulkan dalam hubungan antara "saya" dan "orang lain" adalah *my original fall is the existence of the other*. Dengan demikian, *al-ana* (*the self*) beraktualisasi diri karena kehadiran *huwa-hiya* (dia) dan *hum* (mereka). Dalam hal ini, kebudayaan *mainstream* dan marginal sebenarnya dapat diposisikan sebagai *huwa-hiya* dan *hum*, atau sebaliknya, bisa juga sebagai *al-ana* (*the self*). Hubungan ini dapat berimbang atau lebih berat pada posisinya masing-masing. Sifat posisional semacam ini dapat mengganggu objektivitas, bahkan bisa terjerumus pada *colonial discourse*, baik dari sisi kelompok kebudayaan yang dianggap *mainstream* ataupun pada sisi kelompok kebudayaan yang dianggap marginal.

Tulisan ini berusaha mengangkat persoalan ambang batas kebudayaan, dan termasuk di dalamnya berbagai pertemuan budaya dan bahasa daerah dari berbagai suku bangsa yang dilihat dalam penelitian yang menggunakan pendekatan etnografi. Proses hibriditas dalam perjumpaan tersebut dapat dimaknai sebagai kekayaan budaya di satu sisi, tetapi di sisi lain ia bisa menjadi kekuatan utama bangunan sebuah bangsa. Walaupun pada aspek tertentu, hibriditas budaya dan bahasa daerah dianggap sebagai penyebab dari keaslian karakter kebudayaannya, dan akhirnya menjadi ancaman penting dari sebuah entitas kebahasaan atau kebudayaannya. Namun, hal ini dapat dipilah secara komprehensif, ketika pendekatan etnografi mampu mengungkap nilai dan praktik dari setiap karakter bahasa dan budayanya. Pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat menjadi bahan dari perumusan kebijakan yang cocok berdasarkan karakter sendiri atau karakter hibriditas berbagai kelompok budayanya.

### Metode Penelitian

Tulisan ini didasarkan pada refleksi berbagai penelitian ilmu sosial kemanusiaan, khususnya etnografi yang dilakukan oleh para peneliti di Indonesia, khususnya Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia. Namun demikian, penelitian-penelitian ilmu sosial kemanusiaan umum yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen dari berbagai lembaga lainnya, seperti peneliti di berbagai litbang, perguruan tinggi, dan organisasi non-pemerintah juga dilihat secara seksama. Identifikasi penelitian di atas dimaksudkan untuk melihat kecenderungan, subjek material, dan sudut pandang yang diambil dari para penelitiannya dalam mengamati persoalan kebudayaan di Indonesia pada khususnya. Aspek kebudayaan yang dimaksudkan adalah berhubungan dengan kebahasaan, *worldview* (pandangan dunia), etos, nilai-nilai kearifan, hubungan antarsuku, dan sebagainya.

Penelitian ini didasarkan pada sumber data berupa buku-buku laporan penelitian yang dibuat oleh tim-tim kebudayaan di LIPI, dan beberapa tim dari lembaga lainnya pada periode 1998 sampai 2017. Periode ini menjadi sangat penting karena berhubungan dengan sebuah fase baru kehidupan berbangsa. Reformasi disebut-sebut sebagai perayaan kebebasan demokrasi, tetapi di sisi lain, fase ini mengundang primordialisme kesukuan dan identitas lainnya hendak ditampilkan dalam berbagai kesempatan politik. Reformasi tidak hanya memberi pengaruh besar terhadap dunia politik Indonesia, tetapi juga terhadap aspek-aspek kebudayaan di berbagai suku bangsa yang ada dan terkait pada hubungannya dengan kebudayaan suku bangsa lainnya, serta hubungan antara kebudayaan lokal dan kebudayaan nasional.

Selain review terhadap hasil berbagai laporan penelitian tentang kebudayaan, tulisan ini juga didasarkan pada hasil wawancara dan partisipasi observasi dalam kebersamaan peneliti bersama masyarakat saat menjalankan kegiatan-kegiatan penelitian kebudayaan di berbagai wilayah Indonesia. Artinya, sumber data tulisan ini berasal dari review berbagai hasil laporan, wawancara, dan partisipasi observasi. Analisis data yang dilakukannya adalah deskriptif komparasi, sehingga analisisnya akan lebih bersifat mendalam dan dapat memperoleh gambaran mengenai berbagai persoalan yang ada dari berbagai kegiatan penelitian tentang kebudayaan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

### **Perkembangan Kajian Kebudayaan Pasca-Reformasi**

Selama dua dekade, yaitu sejak reformasi hingga tahun 2017 ini, peneliti ilmu sosial di

Indonesia seolah sedang menikmati “panen raya” penelitian tentang konflik, baik dari aspek penyebab, aktor, akar masalah, dan sejarah panjangnya. Tercatat setidaknya ada 1.200 judul penelitian yang berhubungan dengan konflik yang terekam dalam *www.google scholar.com*. Data itu tentu menunjukkan penelitian konflik yang terpublikasi dalam jurnal, prosiding seminar, opini, *policy brief*, dan buku. Sementara itu, hasil penelitian yang belum terbit masih jauh lebih banyak lagi. Hal ini menunjukkan minat besar penelitian dalam bidang konflik karena saat itu konflik SARA benar-benar merebak dan menjadi ancaman serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Hampir semua konflik yang terjadi pascareformasi berhubungan erat dengan aspek-aspek yang terkandung pada kebudayaan kelompok-kelompok suku bangsa di Indonesia, walaupun konflik atas nama agama pun kerap kali berada di belakangnya. Aspek kebudayaan yang dimaksud mencakup unsur agama dan kepercayaan, pandangan dunia, bahasa, suku, nilai-nilai sosial, perilaku sosial, dan sebagainya yang terbingkai dalam *stereotyping* dan *labelling* negatif dari kelompok suku bangsa tertentu terhadap kelompok suku bangsa lainnya.

Banyak tulisan seperti Irine Gayatri dalam LIPI dan Center for Humanitarian Dialog (2012), Thamrin Amal Tomagola (2006), Ichsan Malik (2008), dan lainnya yang berusaha menghubungkan konflik primordialisme atas nama agama dan suku yang merebak di berbagai wilayah Indonesia tidak dilepaskan dari friksi-friksi di tubuh pemerintah dan militer itu. Ada anggapan (Waileruny, 2011) bahwa tentara terlibat pada proses produksi konflik (*conflict manufacturing*), yang tujuan akhirnya tetap melanggengkan kekuasaan militer pada roda pemerintahan. Penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Ornop memiliki kecenderungan ke arah itu (LIPI dan Centre for Humanitarian Dialogue, 2011). Mereka seringkali menghubungkan kasus konflik Ambon dan Poso, dengan perebutan kekuasaan sumber daya di antara para komisaris perusahaan tambang yang rata-rata dikuasai oleh perwira tinggi militer dan kepolisian. Ada juga yang menghubungkan konflik-konflik itu dengan proses pembangunan Pangdam-Pangdam baru yang mampu menyerap alokasi biaya, kursi jabatan, dan dominasi kekuasaan bagi para perwira tinggi. Refleksi paling menohok adalah apa yang dilakukan oleh George Aditjondro (2007) dalam menanggapi persoalan konflik Ambon dan Poso. Walaupun

datanya kurang kuat dan bersifat subjektif dari temuan Ornop yang berada di sana, ia terlalu berani untuk berkata secara vulgar tentang militer.

Selaras dengan temuan tersebut, Wahid Institute (2014) misalnya memberikan pendapat, bahwa polisi dan tentara juga terlibat dalam penyerangan atau melakukan pembiaran terhadap penyerangan rumah-rumah ibadah di berbagai daerah. Berdasarkan temuan penelitiannya, ada kecenderungan bahwa tentara dan polisi akhirnya menjadi salah satu aktor penting dari berbagai kerusuhan atau konflik atas nama agama, misalnya. Walaupun data Wahid Institute sedikit bertolak belakang dengan temuan Ornop lainnya, semisal Setara Institute (2014), bahwa tentara dan polisi dalam kasus rumah ibadah dan konflik, mereka telah berusaha keras untuk meminimalisasi risiko dan korban yang diderita oleh masyarakat.

Dalam persoalan konflik, ada peneliti yang mengarahkan perhatiannya kepada aktor-aktor yang terlibat, tetapi ada juga yang berusaha menggali akar permasalahan, termasuk sejarah hubungan antar etnik dan suku bangsa yang ada di dalamnya (Patji, 2008; 2012). Persoalan terakhir sangat efektif dalam memetakan akar masalah terjadinya suatu konflik di berbagai wilayah, dan hal ini menjadi ranah utama dari kajian etnografi. Pemahaman terhadap suku bangsa tersebut memungkinkan tidak melulu menuduh pihak-pihak tertentu, khususnya militer dan polisi terlibat dalam berbagai konflik tersebut.

Konflik Lampung misalnya, bagi kelompok peneliti yang melihat dari sudut pandang aktor, maka kerusuhan Balinuraga disebabkan oleh ketidaksukaan orang Lampung terhadap orang Bali yang seringkali dilindungi oleh polisi dan tentara walaupun mereka secara hukum (di mata orang Lampung) telah melakukan tindakan yang salah dan melanggar hukum. Intensitas perilaku kebal hukum itulah yang membuat orang Lampung beranggapan bahwa polisi dan tentara terlibat dalam konflik Balinuraga, khususnya menjadi stimulan penyebab utama konflik. Sementara itu, peneliti etnografi yang melihat pada akar sejarah konflik antara orang Bali dan orang Lampung tidak serta merta mendudukan tentara dan polisi sebagai bagian penting dari konflik tersebut. Mereka hanya dianggap sebagai pihak luar yang memiliki kontribusi dalam meruncingkan konflik. Aktor yang paling

berperan tetap pada dua kelompok suku bangsa itu, dan akar persoalan konfliknya selalu mengarah pada kepentingan ekonomi, politik, dan sosial keagamaan (Humaedi, 2015; Firmansyah, 2014).

Pada aspek terakhir inilah, perspektif kebudayaan dan sejarah sosial menjadi sangat kuat untuk diterapkan. Dengan demikian, ranah kajian kebudayaan tidak hanya dipahami berupa seputar kajian terhadap seni tari, seni musik, lagu, pantun-pantun daerah, kuliner, dan pakaian saja, tetapi kebudayaan juga dimengerti sebagai seluruh sistem pengetahuan, nilai sosial, dan perilaku sosial individu di dalam masyarakat. Kebudayaan sejatinya adalah hasil cipta dari daya, rasa, dan karsa manusia. Ia menunjukkan status kepemilikan tentang seperangkat nilai bendawi dan non-bendawi yang ada pada berbagai masyarakat. Selain tentang cipta, daya, rasa, dan kreasi, fenomena lain yang meliputi sifat-sifat di dalam kebudayaan, seperti pluralisme, multikulturalisme, dan lainnya juga menjadi kajian yang tidak bisa dilepaskan.

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merupakan salah satu lembaga penelitian pemerintah yang sangat aktif dalam menggali kebudayaan dari berbagai dimensi dan perspektifnya. Sejak awal berdirinya di tahun 1970an, yaitu ketika namanya masih Lembaga Riset Kebudayaan Nasional (LRKN), lembaga ini secara aktif menggali kebudayaan dari dimensi kebudayaan material dan immaterial. Saat itu, penelitian tentang tari-tarian, lagu, bahasa daerah, benda-benda kebudayaan, arkeologi, dan sebagainya menjadi semacam “plakat khusus” bagi LRKN dalam pengembangan riset kebudayaannya.

Namun, setelah LRKN dilebur dengan Lembaga Ekonomi Nasional (Leknas), dan berubah namanya menjadi Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI, yang pada masa berikutnya berubah kembali singkatannya menjadi P2KK, ada sedikit perubahan yang terasa dalam kajian kebudayaannya. Hal ini tersirat dari berbagai judul penelitian yang diajukan dan dilakukan oleh para penelitiannya. Penelitian kebudayaan yang dimaksud lebih berorientasi pada seluruh nilai sosial budaya yang ada pada kelompok-kelompok masyarakat suku bangsa di Indonesia. Aspek kebudayaan immaterial diprioritaskan dibandingkan kebudayaan bendawi yang dapat diraba. Aspek terakhir

sepertinya menjadi garapan dari Lembaga Arkeologi dan Balai Pelestarian Nilai dan Budaya Tradisional (BPNT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Saat perubahan dari LRKN ke PMB di tahun 1980-an inilah, peneliti-peneliti yang didasarkan pada bidang kepakaran antropologi, etnografi, sosiologi, bahasa, dan sejarah sosial mulai direkrut. Saat itu, PMB didominasi oleh lulusan Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Brawijaya. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi agama seperti IAIN dan UIN sangat sedikit. Secara substantif, masing-masing universitas itu memiliki karakter tersendiri dalam paham keilmuannya. Ada di antara mereka yang benar-benar menggunakan perspektif fungsionalisme struktural, tetapi ada juga yang mengarahkan perspektifnya pada teori kritik, baik mazhab Frankfurt ataupun mazhab Perancis. Ada juga peneliti bidang kebudayaan yang lebih senang melihat perubahan kebudayaan di wilayah perkotaan, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang benar-benar menikmati pekerjaan lapangannya di berbagai wilayah pedalaman dan pedesaan.

Selain itu, ada juga peneliti yang berusaha melihat kebudayaan *ansich* murni kebudayaan, tetapi banyak juga di antara mereka yang mengangkat kebudayaan pada berbagai dimensi keilmuan lainnya. Mereka memadukan aspek-aspek dan nilai-nilai kebudayaan dalam kehidupan politik, ekonomi, teknologi, dan sebagainya. Pertemuan berbagai perspektif itu telah memberikan warna tersendiri dalam perkembangan kajian kebudayaan di PMB. Nama-nama peneliti PMB pada bidang kebudayaan, baik mereka yang berasal dari jurusan antropologi ataupun jurusan sosiologi dan sebagainya, dapatlah dicatat dengan baik. Nama-nama tersebut misalnya; Johanis (John) Haba, Ninuk Irawati Probonegoro-Kleden, Abdul Rachman Patji, Saleh Buchari, Muhammad Sobari, dan sebagainya.

Selain nama-nama di atas, beberapa nama peneliti yang juga memiliki perhatian terhadap bidang kebudayaan dan seringkali menjadi perspektif dalam penelitian dan penulisannya, adalah Taufik Abdullah, Muhamad Hisyam, Anas Saidi, dan sebagainya. Dari sekian peneliti yang ada, peneliti yang memiliki konsistensi penelitian di bidang kebudayaan, khususnya tentang suku bangsa, nilai-nilai hidup, dan kebahasaan, adalah Abdul Rachman Patji

dan Ninuk Kleden. Sampai menjelang purna tugas, keduanya masih aktif menggeluti bidang-bidang kebudayaan tersebut.

Dalam perjalanannya, para peneliti di atas memiliki karakter dan perspektif keilmuannya masing-masing. Namun, pada tahun 1985-an, para peneliti yang berasal dari ragam keilmuan yang berbeda itu kemudian dapat terhimpun pada penelitian kebudayaan yang dikaitkan pada dimensi ekonomi dan dimensi keagamaan. Saat itu ada proyek penelitian etos dan kewirausahaan yang dilihat dari perspektif kebudayaan yang diusulkan oleh Taufik Abdullah, Anas Saidi, dan lainnya. Tujuan proyek tersebut seperti untuk mendukung pembangunan nasional dalam mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor kultural. Hampir semua peneliti di PMB terlibat dalam penelitian etos dan kewirausahaan.

Pada periode tahun 1980-1997an, beberapa kegiatan penelitian yang berhubungan dengan kebudayaan masih lebih banyak berorientasi pada penggalian data yang berhubungan dengan kebudayaan lokal. Aktivitas penelitian seperti ini tetap berlangsung sampai awal tahun 1998, yaitu ketika pergantian rezim terjadi di masyarakat Indonesia. Reformasi sesungguhnya tidak hanya mengubah tatanan pemerintahan, tetapi juga ikut mempengaruhi kecenderungan dan perspektif pengembangan ilmu-ilmu sosial kemanusiaan, khususnya pada kajian kebudayaan.

Reformasi yang berarti kebebasan berpendapat, pengunggulan demokrasi, dan kesetaraan dalam kehidupan berbangsa, seolah menjadi titik penting dari improvisasi kebudayaan yang pada awalnya bersifat privat dalam kelompok suku bangsanya hadir pada ranah publik yang terakui secara formal. Formalitas yang dimaksud berkaitan erat dengan berbagai kepentingan terkait kekuasaan dan penguasaan di bidang ekonomi-politik. Remah-remah kekuasaan dianggap sebagai piranti penting dalam “memajukan kebudayaan lokal di tengah kebudayaan nasionalnya”. Pada saat itu, politik identitas pribumi dan non-pribumi, menunjukkan usaha memperebutkan remah kekuasaan itu. Berbagai praktik politik identitas bahkan ditunjukkan bukan hanya pada persoalan perebutan kekuasaan politik, tetapi juga ditunjukkan pada berbagai peristiwa konflik yang terjadi di beberapa wilayah.

Konflik SARA atas nama agama pecah di wilayah Ambon. Komunitas tradisional

berbeda agama yang dahulu diikat dengan persaudaraan *pelagandong* berperang antara satu dengan lainnya (Wakano, 2007). Banyak dugaan bahwa militer dan polisi juga terlibat dalam pembentukan laskar, baik laskar Islam ataupun laskar Kristen (Tomagola, 2006). Belum usai konflik Ambon, konflik SARA atas nama agama pun pecah di Poso, Sulawesi Tengah, sebuah wilayah sunyi yang mendadak menjadi sangat ramai dengan pemberitaan peristiwa penuh duka. Bersamaan dengan konflik atas nama agama, terjadi pula konflik SARA atas nama suku di Kalimantan, Papua, dan Lampung. Hampir semua wilayah Kalimantan dilanda konflik suku antara suku Dayak dan Madura dengan intensitas tinggi. Arus pengungsian orang Madura ke tanah suku bangsanya pun terjadi besar-besaran. Namun, ada di antara mereka yang tetap bertahan hingga kini di kantong-kantong wilayah tertentu yang berdekatan dengan pos-pos militer ataupun berada di sekitar pinggir laut. Demikian juga konflik antara suku Dayak dan Bugis yang muncul di Kalimantan Timur, meskipun dalam intensitas rendah tetapi menelan korban puluhan jiwa.

Konflik antara beberapa suku dengan komunitas asli di Kalimantan sebenarnya juga pernah terjadi pada dekade-dekade sebelumnya. Konflik antara suku Dayak dan Madura seolah mengurai kembali sejarah panjang di antara mereka, khususnya sejarah pertemuan awal yang berbasiskan pada transaksi dan distribusi hasil bumi (garam, hasil hutan), dan penguasaan hak ulayat masyarakat Dayak seiring pembalakan hutan di sekitarnya (Mufid, 2012). Demikian juga konflik antara suku Dayak dengan Bugis yang telah terjadi berulang kali. Meskipun dalam skala kecil dan intensitas rendah, beberapa kejadian konflik di antara mereka telah menunjukkan adanya rasa tidak adil secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat asli dari kehadiran dan penguasaan sistem ekonomi masyarakat suku Bugis di wilayahnya. Dengan demikian, sejarah pertemuan dan konflik di antara berbagai suku di wilayah Kalimantan sesungguhnya sarat dengan muatan politik identitas yang bersemayam di antara kepentingan ekonomi dan politik.

Hal demikian juga terjadi di wilayah Sumatera, khususnya Lampung dan Palembang. Suku-suku asli yang merasa dirugikan oleh kehadiran dan penguasaan ekonomi dan politik suku-suku lain yang dianggap secara sepihak penuh *stereotyping* terus melakukan berbagai praktik politik identitas yang mengarah pada

konflik laten di masyarakat. Pada puncak-puncak waktu tertentu, konflik yang bersifat laten tersebut pecah menjadi konflik yang bersifat manifestasi dan menelan kerugian jiwa dan harta. Beberapa catatan kelam konflik antara suku Lampung dengan Bali, dan antara suku Lampung dan Jawa terurai jelas pascareformasi (Setiawan, 2014; Syafii, 2015; Humaedi, 2015). Konflik yang terjadi memang berskala kecil, tetapi intensitasnya cukup tinggi dan sering. Artinya, pertemuan antara kelompok-kelompok suku bangsa yang disebabkan oleh proses kolonisasi di masa penjajahan, transmigrasi di masa Orde Baru, dan migrasi yang bersifat mandiri belum menemukan titik temu yang saling menerima bagi semua pihak pada wilayah-wilayah tertentu. Hibriditas yang ada hanya pada tataran kebudayaan muka, belum sampai pada tingkat kebudayaan mendalam, seperti pemahaman terhadap pandangan dunia, pengertian atas nilai-nilai kebudayaan, dan lainnya.

Pertemuan itu masih menunjukkan batas-batas yang jelas antara siapa yang asli bermukim, dan siapa pula yang pendatang. Bahkan orang Papua, khususnya di Kota Merauke dan Skouw perbatasan Wutung Papua Nugini, identitas “warga asli” (orang asli Papua dari berbagai suku, seperti Marind, Kemayon, dan sebagainya) dan “warga umum” untuk warga pendatang dari berbagai suku seperti Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Toraja, dan sebagainya menjadi media paling penting dalam pemberian batas akses-akses pelayanan dan keterlibatan seseorang dalam semua sektor pemerintahan (Haidhar dan Fahmi, 2017).

Hal ini semakin diperparah ketika *stereotyping*, etnosentrisme, dan *labelling* terus melekat di dalam proses pergaulan sosialnya. Sepertinya, proses *cross-cutting*, dalam arti hibriditas kebudayaan di antara berbagai suku bangsa itu kurang terjadi secara intens. Padahal hibriditas kebudayaan di antara kelompok suku bangsa tersebut memungkinkan pertemuan sosial dalam menemukan katup-katup pengaman jejaring sosialnya.

Pascareformasi inilah, penelitian-penelitian kebudayaan mulai mengarah pada upaya mencari dan mendalami modal-modal sosial yang mampu menjadi katup-katup pengaman jejaring sosialnya. Para peneliti berupaya mengangkat aspek-aspek kebudayaan sebagai media penting dalam penyelesaian konflik. Selain itu, para peneliti

juga berupaya menggali nilai-nilai sosial dan karakter kebudayaan suku bangsa seperti apa yang memiliki potensi kuat untuk menciptakan konflik. Artinya, ada dua karakter khas pendekatan yang dilakukan para peneliti dalam memahami konflik yang terjadi. *Pertama*, pendekatan penyelesaian konflik dengan cara menggali akar permasalahan dan modal-modal sosial kebudayaan yang berpotensi meredakan konflik. *Kedua*, pendekatan mitigasi atau pencegahan konflik, yaitu upaya menelusuri sejarah dan falsafah hidup berbagai suku bangsa—baik yang sudah berkonflik ataupun yang belum berkonflik—untuk memetakan persoalan praktik hidup yang berpotensi pada terjadinya konflik ataupun potensi yang membangun perdamaian, toleransi, dan harmoni. Upaya menggali sejarah dan falsafah hidup itu menjadi sangat penting untuk kepentingan pencegahan konflik, sehingga potensi konflik yang akan terjadi pada suku-suku bangsa tertentu dapat dicegah atau dihindari.

Dua karakter pendekatan di atas pun dilakukan para peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI. Karakter pertama dimotori oleh Thung Ju Lan melalui proyek-proyek penelitian tentang konflik. Pada awalnya, penelitian ini hanya bersifat DIPA Tematik pada satuan kerja PMB. Pada perkembangannya, karakter penelitian ini akhirnya menjadi tema dari salah satu bidang dalam penelitian kompetitif LIPI. Thung Ju Lan sendiri kemudian mengkoordinasikan beberapa penelitian tentang varian-varian konflik, akar permasalahan, modal sosial penyelesaian konflik, dan strategi penyelesaian konflik. Para penelitiannya berasal dari gabungan peneliti pada kedeputan ilmu sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, karakter ini benar-benar dibangun dari perspektif multidisiplin. Ada peneliti yang melihatnya dari dimensi ekonomi, politik, migrasi dan kewilayahan, dan sumber daya, baik dalam aspek penyebab-penyebab konflik ataupun dalam aspek upaya penyelesaian konfliknya. Penelitian karakter pertama ini telah menghasilkan *output* berupa buku laporan, jurnal, dan buku saku peredaman konflik.

Sementara itu, pada karakter penelitian yang kedua, Abdul Rachman Patji dapat disebut sebagai motor penggerakannya. Walaupun tidak seluruhnya berorientasi pada upaya mitigasi konflik, tetapi penelitian-penelitian pada karakter kedua ini menjadi sangat potensial dikembangkan untuk memetakan akar persoalan dan modal kebudayaan seperti apa yang bersentuhan

langsung dengan persoalan konflik. Dari penelitian karakter kedua inilah, katup-katup pengaman jejaring sosial itu bisa ditemukan, dibingkai, dan dijadikan strategi dalam membangun masyarakat yang aman, toleran, dan harmonis. Melalui proyek-proyek penelitian tentang suku bangsa, etnisitas, dan *worldview* pada komunitas-komunitas suku bangsa di Nusantara inilah, Abdul Rachman Patji dapat menyodorkan aspek-aspek dan perspektif kebudayaan untuk mampu menjadi alat peredaman konflik.

Pada perkembangannya, karakter penelitian kedua ini kemudian memasuki ranah kebudayaan dari sisi kebahasaan. Penelitian kebahasaan yang ada relatif berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Badan Bahasa. PMB LIPI lebih membangun perspektif sosiolinguistik dan etnolinguistik daripada membangun aspek linguistik murni. Perspektif sosiolinguistik dan etnolinguistik menjadi sangat strategis di dalam upaya mitigasi dan peredaman konflik, karena banyak nilai-nilai positif kebudayaan yang tergalai dan dapat dikembangkan sebagai strategi jaring pengaman sosialnya. Selain untuk kepentingan pelestarian kebudayaan, baik dalam konteks struktural dan formalitas, ataupun dalam arti kultural dan informal, penelitian tentang kebahasaan dan kebudayaan tersebut juga memungkinkan hadirnya sistem peringatan dini terhadap konflik, dan sebagainya. Penelitian pada karakter kedua ini dapat dinyatakan sangat berhasil, karena menjadi program unggulan dan prioritas nasional. Karakter penelitiannya juga masih berlangsung hingga tahun 2017 ini.

### **Mempraktikkan Etnografi pada Penggalian Bahasa dan Budaya Daerah**

Kajian kebudayaan di Indonesia, walaupun bagi para peneliti pemula seolah telah dibahas semuanya oleh para peneliti terdahulu baik dari Indonesia ataupun luar negeri, tetapi ranah kajian dalam berbagai perspektif masih dapat dilakukan dengan komprehensif. Hal ini disebabkan Indonesia terdiri dari ratusan etnik dan masing-masing etnik pada umumnya memiliki bahasa dan budayanya sendiri. Kelompok etnik tersebut berada pada kantong-kantong wilayah tertentu ataupun telah menyebar ke berbagai wilayah lintas dari tempat asalnya. Dalam arti sederhana, etnik tertuju pada kelompok manusia atau masyarakat beserta kebudayaannya, sementara bahasa tertuju pada sistem komunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Hal paling penting adalah bahasa menjadi alat

representasi kebudayaan dari kelompok-kelompok etnik yang ada.

Memotret bahasa berarti juga memotret kebudayaannya, dan sebaliknya pengungkapan aspek kebudayaan dalam berbagai dimensinya mau tidak mau harus mengungkap kosakata-kosakata kebahasaan yang khas. Kosakata bahasa dari dimensi kebudayaan yang ada dimaknai sesuai dengan bahasa aslinya, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain, dan konteks dari kosakata tidak boleh dilepas begitu saja. Konteks itu adalah kebudayaannya, sedangkan hal penjelas dalam suatu ungkapan tertentu adalah bahasa. Oleh karena itu, dalam bidang sosial kemanusiaan, penelitian bahasa dan kebudayaan tidak bisa dilepaskan antara satu dengan hal lainnya.

Kedua aspek di atas pun menjadi sangat penting ketika dihadapkan pada isu-isu peringatan dini dan penyelesaian konflik yang seringkali terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memetakan dan mengukur proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan komitmen masyarakat dalam mengikatkan dirinya pada keindonesiaan. Penelitian Humaedi (2016) tentang rumah bentang dan peralihannya menjadi rumah individual di Kalimantan Barat, dinyatakan oleh Muhammad AS Hikam (2016), sebagai potret membaca Indonesia dari kebudayaan lokal. Di dalamnya penuh dengan kontestasi pemaknaan, sehingga ke-Indonesiaan pun akhirnya memiliki ragam makna yang tidak bisa memenangkan satu pemaknaan tertentu saja.

Keindonesiaan pun dapat terlihat jelas dalam persoalan keragaman bahasa dan pemaknaan atasnya. Bahasa seringkali melekat pada satu kelompok etnik tertentu, walaupun ia juga seringkali digunakan oleh kelompok etnik lain dengan makna dan konteks yang berbeda. Kenyataan ini didapatkan sebagai buah pertemuan antara dua atau lebih kelompok etnik dan kebudayaannya. Ungkapan kata kebahasaan boleh satu, tetapi pemakai dan maknanya bisa lebih dari satu. Di sinilah karakteristik khusus kebahasaan terlihat; bahwa bahasa dapat berubah-ubah sesuai dengan konteks kebudayaan penuturnya. Oleh karena itu, jumlah bahasa akan jauh lebih sedikit daripada jumlah komunitas etnik, sedangkan jumlah dialek bisa lebih banyak dari jumlah bahasa dan kelompok etnik yang ada.

Jumlah entitas etnik di Indonesia hingga kini masih tetap bertahan, karena ia terkait dengan identitas kelompok manusia yang hidup dan memiliki sistemnya tersendiri, baik dalam wilayah tertentu atau telah mengalami penyebaran. Sebagian kecil di antara mereka masih hidup berpindah atau nomaden, tetapi umumnya mereka telah banyak memilih menetap pada wilayah-wilayah tertentu. Jumlah kelompok etnik dan termasuk kebahasaannya akan berkurang, bila ia mengalami situasi darurat yang mengurangi atau menghabiskan populasinya. Hal ini bisa berhubungan dengan kebencian etnis, sehingga terjadi genosida (pemusnahan etnis) sebagaimana yang terjadi di wilayah Afrika, Uni Soviet, Australia, atau karena serangan sakit dan penyakit yang menghabiskan seluruh populasi etniknya, sebagaimana yang dialami kelompok tertentu di Afrika, Amerika Latin, dan wilayah kutub.

Di Indonesia, genosida etnik dan bahasa sendiri tidak pernah terjadi. Negara ini sangat menghargai keberadaan kelompok suku bangsa dan termasuk kekayaan kebudayaan di dalamnya, walaupun pelayanan dan jaminan terhadap mereka kadang masih bersifat terbatas. Selain alasan fisik tersebut, jumlah kelompok etnik juga bisa berkurang sebagai akibat dari tidak adanya pengakuan terhadap etnik tersebut. Tiadanya pengakuan itu disebabkan karena adanya tekanan-tekanan struktural dan kultural tertentu, baik berupa tekanan fisik ataupun psikis.

Serupa dengan pengurangan populasi kelompok etnik, entitas kebahasaan dan kebudayaan juga bisa mengalami penurunan jumlah penutur dan pelaku kebudayaannya, ataupun hilang sama sekali. Ancaman kepunahan bahasa daerah, yang di dalamnya juga ada makna tentang budaya lokal, seringkali terlihat dan terjadi di sekelilingnya. Pihak pengancam atau pemberi pengaruh terhadap vitalitas kebahasaan suatu kelompok etnik tertentu berasal dari tiga pihak. Pemberi pengaruh pertama berasal dari kekuatan formal, yaitu bahasa nasional ketika kelompok penutur bahasa itu berada pada satu wilayah negara tertentu dan tunduk untuk menggunakan bahasa nasional dalam berbagai ranah kehidupannya.

Aktor pemberi pengaruh terhadap keberadaan bahasa daerah seperti ini sangat nyata, sehingga berdampak terhadap bahasa nasional yang digunakan dalam ranah-ranah atau ruang pribadi bahasa daerah. Penggunaan bahasa

Indonesia misalnya telah memasuki wilayah ruang adat dan ritus, tempat doa dan mantra telah diinfiltrasi oleh bahasa Indonesia. Hal ini terlihat nyata dalam ritus masyarakat Dayak di Kalimantan Barat (Sudiyono, 2013), orang Batak di Sumatera Utara (Tumanggor, 1999), dan masyarakat Kafoa di Alor Barat Daya NTT (Humaedi, 2014). Ranah keluarga, termasuk perawatan anak, juga tidak lepas dari pengaruh penggunaan bahasa nasionalnya. Apalagi pada ranah pendidikan, hampir sebagian besar generasi muda penutur bahasa daerah telah dikenalkan bahasa nasional pada pendidikan anak usia dini (PAUD), sehingga kemampuan bahasa daerahnya “telah terganggu” dengan penggunaan bahasa nasionalnya (Sukmawati, 2016; Tondo, 2016; Patji, 2015; Hisyam, 2014).

Pemberi pengaruh kedua adalah bahasa daerah lain yang berada di sekitar entitas bahasa daerahnya. Keberadaan suatu entitas bahasa daerah bisa saja dipengaruhi oleh keberadaan bahasa daerah lain, karena perbedaan mencolok di antara keduanya. Populasi penutur bahasa mayoritas di sebuah daerah memungkinkan bahasa daerah lain terdesak, tidak berkembang, dan akhirnya mengalami kepunahan. Pola ancaman seperti ini terjadi misalnya pada kasus kebahasaan di wilayah Alor, bahwa bahasa mayoritas Klon telah mendesak penggunaan bahasa-bahasa daerah lain semisal Kafoa, Beilel, dan Pura di sekitar selat Tereweng-Pura. Terlebih ketika penggunaan bahasa Klon dilindungi oleh janji akad darah dari berbagai entitas penutur kebahasaan yang mengharuskan para penutur bahasa sekitar wilayah tersebut harus menggunakan bahasa Klon ketika ada pertemuan di pasar ataupun ritual-ritual tertentu yang melibatkan para penutur dari berbagai bahasa etnik lainnya (Sudiyono, 2013).

Pemberi pengaruh terakhir adalah kelompok internal penutur di wilayah kebahasaannya. Jenis ancaman dan komponen pengaruhnya berasal dari perkawinan campuran, kurangnya kepercayaan diri, dan ketidakmauan penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranahnya. Tanda-tanda itu sudah terlihat jelas pada keluarga di wilayah yang memiliki bahasa daerah, termasuk dalam transmisi kebahasaan pada proses pemeliharaan atau perawatan anak-anak usia kritis kebahasaan. Ancaman terhadap bahasa daerah juga mengindikasikan adanya peningkatan ancaman terhadap keberadaan kebudayaan daerah. Hilangnya bahasa daerah pada mantra asli, misalnya, juga akan mengubah

atau menghilangkan konteks pandangan dunia (*worldview*) dalam sebuah susunan kalimat-kalimat pada mantra tersebut. *Worldview* yang dipegang oleh masyarakat adalah sebuah khazanah kebudayaan yang didasarkan pada nilai-nilai pengetahuan dan kepercayaan pada sebuah konteks wilayah tertentu (Patji, 2008).

Tiga aktor pemberi pengaruh keberadaan bahasa dan budaya daerah di atas terlihat pada bahasa-bahasa yang ada di berbagai wilayah Indonesia, walaupun prosesnya sangat lambat dan kadang tidak disadari oleh para penutur bahasa dan pelaku budayanya sendiri. Jika ancaman yang berasal dari tiga pihak di atas terus terjadi dan dilakukan secara sistematis terhadap bahasa daerah khususnya, maka menurut sosiolinguis Skutnabb-Kangasi (1999: 48), proses “genosida linguistik” telah mulai dilakukan. Kata genosida di sini, tidak merujuk pada “sebuah pembantaian etnik penutur kebahasaannya”, tetapi merujuk pada proses “kehilangan bahasa daerahnya”. Ia seolah berjalan secara alamiah dengan hadirnya tiga pengancam atau pemberi pengaruh di atas yang masuk ke dalam wilayah komunitas penuturnya. Lebih lanjut, Skutnabb-Kangasi (1999: 52) menyatakan bahwa “jika bahasa daerah tidak lagi digunakan sebagai media utama pendidikan dan perawatan anak, atau sebaliknya telah terjadi pelanggaran penggunaan bahasa daerah di dalam pergaulan sosial harian di rumah dan di sekolahnya, hal yang terjadi sesungguhnya adalah apa yang disebut “genosida linguistik”.

Jika ditelusuri dari perjalanan penelitian bahasa dan budaya yang terancam punah, khususnya dalam Prioritas Nasional (PN 11), proses “genosida linguistik” yang berjalan alamiah dan tanpa disadari sebenarnya mulai terlihat terjadi di berbagai kelompok penutur. Proses ini tentu terjadi karena tiga pemberi pengaruh di atas seolah melupakan atau membiarkan bahasa daerahnya tidak terpakai dan kemudian menghilang dengan sendirinya. Peristiwa bahasa daerah Beilel di sekitar masyarakat Kafoa yang tinggal dua orang penutur saja telah menjadi bukti bahwa tiga pemberi pengaruh vitalitas kebahasaan itu hadir dan melemahkan bahasa daerah. Walaupun aktor negara tidak hadir dalam proses pelemahannya, tetapi lingkungan kebahasaan sekitar telah memojokkan bahasa Beilel ini menjadi lemah dan akhirnya menghilang (Sudiyono, 2013). Hal ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa bahasa Beilel tidak hidup dalam sebuah kelompok suku

bangsa sendiri. Bahasa ini seolah “menumpang” dalam kehidupan kelompok etnik Kafoa dan Klon yang masing-masing memiliki bahasanya sendiri. Dengan demikian, tingkat partisipasi penggunaan bahasa Beilel pun menjadi sangat lemah. Hal seperti ini pun terjadi pada tingkat partisipasi bahasa Oirata di pulau Kisar, sebagaimana yang diteliti oleh Leolita Masnun dan Soewarsono (2014).

Fenomena hadirnya semacam “genosida linguistik” dalam arti sebuah proses, tidak hanya merujuk pada aspek kebahasaan, melainkan juga pada aspek kebudayaannya. Artinya, menghilangkan atau memusnahkan bahasa, berarti menghilangkan dan memusnahkan budaya para penuturnya, dan demikian sebaliknya. Apalagi jika diilustrasikan bahwa kebudayaan itu adalah rumah dan bahasa itu adalah pintunya, maka ketika rumah itu telah kehilangan pintunya, ia “tidak akan pantas” disebut rumah. Keadaan ini kemudian hanya disebut sebagai sebuah bangunan yang di dalamnya tidak memiliki banyak makna. Ketika bangunan itu tidak lagi bisa dimasuki penghuninya, ia tidak akan bermanfaat apapun, dan tidak memberikan pengaruh timbal balik dalam proses pengembangannya. Ia hanya akan menjadi tempat penguburan dari semua nilai dan sistem kebudayaan dan kebahasaan yang pernah dikenal sebelumnya. Dalam konteks ini, maka pengancam atau pemberi pengaruh pertama dan kedua menjadi aktor yang paling berpeluang dalam memusnahkan dua aspek kedaerahan tersebut.

Dalam Konvensi Internasional untuk Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yang disiapkan oleh PBB, genosida linguistik dan budaya ditulis secara bersamaan dengan genosida fisik yang berhubungan dengan kelompok etnik dan agama tertentu. Ancaman keduanya dianggap sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan (Skutnabb-Kangasi, 1999). Oleh karena itu, menjaga dan memulihkan bahasa (dan termasuk kebudayaan) daerah pada akhirnya harus menjadi bagian dari reformasi sosial suatu bangsa (Fishman, 1989). Apa yang dinyatakan oleh Fishman tentang kaitan bahasa dan reformasi sosial dapat dipahami bahwa aspek-aspek kebahasaan harus menjadi bagian dari praktik kehidupan masyarakat, dan termasuk praktik kebijakan negara yang mampu melindunginya dari ancaman kepunahan.

Selaras dengan pendapat Fishman di atas, bahasa dan budaya daerah sesungguhnya

menjadi modal sosial dari sebuah bangsa. Modal sosial tersebut bisa berdiri sendiri sesuai konteks pelaku di wilayahnya masing-masing. Mereka akan berusaha melestarikan kekayaannya di satu sisi, dan akan memanfaatkannya sebagai media penting pengikat kebersamaan di sisi lainnya. Melalui kesamaan bahasa dan budaya, integrasi sosial dengan mudah dapat diikat bersama. Terlebih ketika sistem budaya tersebut telah memiliki pesan-pesan dan nilai-nilai moral yang saling menjaga, membuat harmoni, toleransi, dan sebagainya yang sangat kuat, maka ia akan menjadi media penting pencegahan konflik atas nama suku.

Dalam konteks lebih luas, modal sosial pada setiap suku bangsa tersebut merupakan bangunan sosial yang bisa dimanfaatkan untuk membangun kebersamaan dan harmoni sebuah bangsa. Ibaratnya, ketika bangunan-bangunan itu telah kokoh dengan nilai-nilai budaya positif dan memiliki unsur penghargaan terhadap kelompok-kelompok suku bangsa lain, dan demikian sebaliknya, kelompok suku lain pun memiliki hal serupa, maka pertautan antara bangunan itu akan membentuk sebuah bangunan bangsa yang kokoh dan hebat. Oleh karena itu, penelitian-penelitian etnografi yang menjadikan bahasa dan budaya sebagai *objek matter* akan menjadi sangat strategis dalam menyiapkan, melanggengkan, dan memaknai kehidupan bangsa, dan menjauhkannya dari berbagai konflik yang ada.

Tujuan penelitian etnografi pada bidang bahasa dan budaya di atas inilah yang menjadi dasar penting mengapa penelitian-penelitian kebahasaan yang ada di PMB LIPI selalu berbeda dengan penelitian kebahasaan yang dilakukan oleh Badan Bahasa ataupun kantor bahasa lainnya. Penelitian bahasa yang ada akan selalu dilekatkan dengan perspektif kebudayaan, sehingga akan menghasikan kecenderungan etnolinguistik dan sosiolinguistik yang komprehensif. Selain itu, penelitian kedua aspek tersebut seringkali dihubungkan dengan isu-isu integrasi nasional, peneguhan kedaulatan NKRI, dan pembangun kebersamaan sebuah bangsa. Isu-isu ini dihadirkan bersamaan dengan upaya penggalan dan pelestarian bahasa dan budaya yang ada pada berbagai suku bangsa di Indonesia.

## Penelitian Etnografi di Balik *Affirmative Action* Penyelamatan Kekayaan Bangsa

Demi pencapaian tujuan penelitian yang mengedepankan pembangunan bangsa di satu sisi, dan di sisi lain mendorong proses pelestarian bahasa dan budaya berbagai suku bangsa, maka pendekatan emik kebudayaan dan etik kebijakan selalu menjadi pijakan dalam penelitian bahasa dan budaya daerah. Penggalian terhadap peran dan karakternya masing-masing juga selalu diperhatikan dalam prosesnya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bahasa dan budaya daerah memiliki hak asasinya masing-masing. Khususnya bahasa, "hak asasi dalam persoalan linguistik termasuk dalam kegiatan pendidikannya merupakan prasyarat penting dari upaya dan tanggungjawab bersama dalam proses pemeliharaan keanekaragaman di dunia ini" (Skutnabb-Kangasi, 1999: 58). Dengan demikian, hak asasi kebahasaan dan kebudayaan, sebagaimana hak asasi manusia dalam berbagai aspek lain, wajib dipertahankan dan dijaga secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat dan negara (Fishman, 1989).

Salah satu upaya penegakan hak asasi dalam hal kebahasaan dan kebudayaan daerah adalah memasukkan wacana dan praktik perlindungannya sebagai bagian penting dari kekayaan dan khazanah kebudayaan nasional dan termasuk peninggalan dunia bagi kemanusiaan. Ketika bahasa dan budaya daerah diposisikan sebagai bagian dari kebudayaan nasional, sebenarnya ada tuntutan dan kewajiban yang harus dilakukan, yaitu negara harus melindungi keduanya. Perlindungan tersebut memiliki beraneka macam langkah; ada yang bersifat artifisial, tetapi ada juga yang bersifat substansial. Langkah artifisial misalnya dengan memasukkan bahasa dan budaya daerah sebagai objek pariwisata. Keduanya dimodifikasi untuk kepentingan hiburan yang menarik minat kunjungan pariwisata. Para pelaku kebudayaannya benar-benar dijaga atau dirawat dan dihidupi. Sayangnya, kebudayaan direduksi hanya menjadi bidang kesenian saja, khususnya seni tari. Hal seperti ini juga diartikan sebagai bentuk perlindungan hak asasi kebudayaan.

Sayangnya, langkah yang bersifat artifisial di atas seringkali menafikan aspek-aspek kebudayaan lain yang mencakup pandangan dunia atau pandangan hidup, sistem sosial, struktur sosial, pengetahuan dan teknologi lokal, bahasa, dan sebagainya. Hal yang paling sering

terlihat adalah bahwa budaya kemudian hanya menjadi tontotan semata, dan negara hanya melindungi "barang-barang" yang bisa ditonton atau barang bendawi saja. Di sisi lain, aspek-aspek kebudayaan lain yang tidak bisa ditonton atau dipegang, akhirnya dilupakan oleh negara. Salah satunya adalah bahasa daerah. Aspek ini seringkali dinafikan kehadirannya, dan bisa jadi dianggap sebagai "pengganggu" eksistensi bahasa nasional dalam berbagai ranahnya. Langkah artifisial seperti inilah yang menyebabkan hadirnya kecaman dari berbagai pihak yang menuduh bahwa negara tidak melindungi kekayaan bahasa dan budaya daerah, atau kebudayaan nasional telah meminimalkan peran dan khazanah bahasa dan kebudayaan daerahnya.

Jika merunut pada teori perencanaan bahasa, langkah substansial yang bisa diletakkan pada upaya melindungi bahasa daerah dari kepunahannya adalah dengan mempertemukan antara perilaku penutur dengan pendukung kebahasaan – dan pelaku kebudayaan – yang ada. Perilaku penutur adalah sikap kebahasaan yang ditunjukkan penutur untuk mengintensifkan penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranahnya. Upaya ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali bahasa daerah yang terancam punah karena banyak penutur telah meninggalkan bahasa daerah dan generasi muda pada usia kritis tidak lagi diajarkan bahasa daerah oleh orang tuanya. Kesadaran penutur bahasa daerah itu bisa didapatkan dari pengalamannya langsung dengan komunitas penutur bahasa lain yang benar-benar terancam punah, atau perasaan kebanggaan tertentu yang hadir karena adanya stimulus akan kejadian-kejadian tertentu, ataupun karena adanya gugatan dari pihak lain yang mendukung pelestarian bahasa daerah tersebut.

Upaya pelestarian bahasa secara substansial dapat mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh Austin dan Sallabank (2011) tentang kepentingan perencanaan bahasa. Istilah perencanaan bahasa atau *language planning* pertama diperkenalkan oleh Haugen (1959). Dalam artikelnya, Haugen mengemukakan bahwa perencanaan bahasa adalah suatu usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan para perencana. Usaha-usaha itu misalnya menyiapkan ortografi, penyusunan tata bahasa, dan kamus yang normatif sebagai panduan untuk penulis dan pembicara dalam suatu komunitas bahasa yang tidak homogen. Menurut Sallabank (2011), ada tiga aktivitas penting dalam

perencanaan bahasa, yaitu *corpus planning*, *status planning*, dan *acquisition planning*.

Perilaku penutur dalam penguatan bahasa daerah yang merunut pada teori perencanaan bahasa pada umumnya muncul berdasarkan kesadaran individu ataupun arahan dari para pemimpin lokal yang dipatuhi. Kesadaran itu bisa saja muncul karena alasan pemertahanan hak ulayat, legitimasi politik lokal, dan politik identitas tertentu yang bertumpu pada semangat primordialisme. Kebahasaan daerah yang melekat pada kebudayaan dan kelompok etnik tertentu sangat dekat dengan isu-isu primordialisme. Inisiatif internal masyarakat penutur berpotensi menjadi ikatan primordialisme baru. Sementara itu, adanya kelompok pendukung di tengah partisipasi masyarakat penutur dalam upaya pelestarian bahasa daerah dapat menjaga ikatan dan semangat primordialisme menjadi bersifat terbatas dan dapat dikelola untuk kepentingan nasional. Kelompok pendukung itu bisa berada pada posisi pemerintah daerah, budayawan, penggiat, dan lembaga swadaya masyarakat. Kelompok pendukung dalam sistem perencanaan bahasa daerah inilah yang dikategorikan sebagai aktor daerah yang memiliki peran dalam upaya pelestarian dan pengelolaan bahasa dan budaya daerah.

Para peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI juga berusaha menjadi kelompok pendukung vitalitas kebahasaan dan kebudayaan lokal di berbagai daerah. Penelitian bahasa dan budaya yang terancam punah di berbagai kelompok suku, seperti Kafoa, Pagu, Kui, Oirata, Gamkonora, Hamap, Kao, dan sebagainya telah dilakukan secara intensif oleh para peneliti, baik melalui skema DIPA Tematik, Unggulan, ataupun Prioritas Nasional. Dalam konteks penelitian bahasa dan budaya Kafoa di Pulau Alor, misalnya, kehadiran peneliti tidak saja mampu melestarikan bahasa dan budaya Kafoa dalam bentuk dokumen kekayaan budayanya, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian bahasa dan budaya daerah bagi para pelaku di lokasi penelitiannya.

Bahkan kelompok peneliti Kafoa telah berhasil mendorong *affirmative action* yang dilakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati tentang Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa dan Budaya Lokal, dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan untuk sistem pembelajaran bahasa dan budaya daerah

di berbagai sekolah. Selain itu, tim Kafoa juga telah berhasil menjadikan modul pembelajaran bahasa lokal setempat seri 1 dan seri 2 untuk menjadi master dari berbagai modul yang akan dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam upaya pelestarian bahasa-bahasa daerah di Alor.

Kafoa adalah nama sebuah bahasa di Alor Nusa Tenggara Timur. Pengenalan pertama memang berasal dari dokumen *Joshua Project*, sebuah lembaga Kristen yang memiliki misi khusus penerjemahan Al-Kitab dalam berbagai bahasa daerah. Sayangnya, *project* tersebut tidak pernah menghasilkan apapun tentang bahasa Kafoa, penerjemahan Al-Kitabnya, ataupun dokumen lain terkait bahasa Kafoa. Pengenalan pertama ke jalur ilmu pengetahuan dan sosialisasinya ke berbagai pihak, dengan memanfaatkan berbagai media publikasi, seperti jurnal, buku, prosiding, modul, opini, esai, laporan teknis, poster, film dokumenter, kamus, dan sebagainya dilakukan oleh tim Peneliti Prioritas Nasional (PN 11) LIPI di tahun 2011-2014 yang pada awalnya dikoordinasikan oleh Abdul Rachman Patji dan dilanjutkan oleh M. Alie Humaedi, dan ditindaklanjuti kembali dengan kegiatan penutup melalui skema DIPA 2017, telah menemukan sebuah titik upaya yang cukup menggembirakan.

Kafoa, kini tidak hanya dikenal oleh masyarakat penuturnya. Ia telah dikenal juga oleh ilmuwan, para peneliti, pemerintah daerah, dan pihak media massa. Banyak pihak seringkali bertanya tentang mengapa bahasa Kafoa ini yang dipilih sebagai objek penelitian, mengapa budaya masyarakat Kafoa dianggap penting untuk diangkat sebagai bagian dari penelitian bahasa, dan bagaimana pula cara tim peneliti mendorong kesadaran berbahasa, dan termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa dan budaya daerah Kafoa. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya dijawab dengan argumentasi-argumentasi ilmiah, bahwa bahasa Kafoa adalah bahasa yang terancam punah karena penuturnya kurang dari 1.000 orang. Demikian juga bahwa bahasa Kafoa merupakan aset kebudayaan bangsa yang harus dipertahankan oleh para anak bangsa. Selain itu, sebagai strategi *language planning*, bahasa Kafoa harus didorong menjadi sebuah korpus yang berisi sekian dokumen kebahasaan, sehingga ada kesinambungan berbahasa yang sama persis dengan masa-masa sebelumnya. Argumentasi ilmiah itu telah tertorehkan dalam berbagai

laporan yang bersifat terbuka ataupun buku dan jurnal yang tersiar ke khalayak umum.

Namun, dibalik alasan atau argumentasi ilmiah yang didorong oleh tim peneliti, alasan lain yang mau atau tidak mau diakui adalah menjadikan para penutur dan masyarakat sekitar Kafoa sebagai bagian dari keluarga besar tim peneliti LIPI. Pendekatan personal dan kolektivitas sebagaimana dalam tradisi etnografi, sengaja atau tidak sengaja, disadari atau tidak disadari, adalah langkah strategis dalam penguatan kapasitas dan penumbuhan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya penggunaan dan pelestarian bahasa dan budaya Kafoa yang dimilikinya. Ada beberapa peristiwa etnografi yang bersifat pribadi dan kolektif yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada niat tulus tim peneliti dalam melestarikan bahasa dan menjaga budaya Kafoa. Lima peristiwa itu adalah sebagai berikut.

*Pertama*, peristiwa menggendong dan mengantarkan langsung seorang anak penutur bahasa Kafoa yang terbaring sakit selama sembilan bulan di rumahnya ke rumah sakit umum daerah di Kalabahi, Alor, dan kemudian membiayai keluarganya sepanjang proses perawatan inap dan pengobatan di rumah sehingga akhirnya sembuh pada lima bulan setelahnya merupakan pijakan awal tumbuhnya kepercayaan masyarakat di dusun Lola dan Habollat terhadap tim peneliti. *Kedua*, peristiwa menyelesaikan konflik rumah tangga sebuah keluarga muda yang sudah menahun lamanya di dusun Kalibeng pun menjadi catatan tersendiri dari tingkat keberterimaan masyarakat. *Ketiga*, proses pembiayaan tiga anak yatim dari dusun Lola dan Habollat, dari saat hendak lulus SD, proses masuk SLTP, dan hingga kemudian diterima di tingkat SLTA, telah memungkinkan semakin kuatnya ikatan kepercayaan antara masyarakat dan tim peneliti. *Keempat*, keterlibatan tim peneliti dalam proses pembangunan rumah ibadah, baik masjid ataupun gereja, juga semakin menyakinkan warga penutur Kafoa, bahwa peneliti hadir sebagai bagian dari kehidupan mereka. *Kelima*, peneliti juga telah membawa dan mengasuh dua orang anak dari dusun A dan dusun B untuk disekolahkan di Jakarta. Kedua orang anak itu akhirnya menjadi penguat hubungan antar peneliti dan masyarakat.

Lima peristiwa di atas dan ditambah dengan bangunan relasi sosial lainnya telah membuat pencapaian penelitian pelestarian

bahasa dan budaya Kafoa menjadi relatif sangat besar. Pencapaian itu didasarkan pada indikator penting, seperti (i) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian bahasa dan budaya Kafoa; (ii) Munculnya keinginan masyarakat untuk ikutserta dalam proses pendokumentasian bahasa dan budaya Kafoa; (iii) Adanya peningkatan praktik kebahasaan Kafoa di dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga; (iv) Penggalan kembali nilai bahasa dan budaya Kafoa, dan kemudian dilakukan berbagai perlombaan untuk para generasi muda; (v) Penggunaan nilai-nilai sosial budaya Kafoa dari generasi lalu untuk memperkuat hubungan sosial dan relasi masyarakat dan negara dalam berbagai pertemuan sosial; (vi) Penggunaan modul bahasa Kafoa sangat disambut antusias oleh dunia pendidikan di desa Probur Utara, dan bahkan dijadikan panduan oleh beberapa sekolah di Alor untuk menjadikannya sebagai standar muatan lokal; (vii) Adanya *affirmative action* dari pemerintah kabupaten Alor, setelah melalui beberapa kali dengar pendapat, untuk mengeluarkan peraturan daerah atau surat daerah terkait penggunaan bahasa dan budaya daerah sebagai muatan lokal pembelajaran di sekolah dasar dan sekolah menengah.

Dari tujuh indikator penting di atas, penelitian etnografi kebahasaan dan kebudayaan Kafoa di atas lebih terlihat jelas pada tiga indikator keberhasilan yang saling terkait. *Pertama*, penggunaan nilai-nilai sosial budaya Kafoa dalam bahasa Kafoa yang bertujuan untuk menjalin relasi sosial yang baik dan memperkuat relasi masyarakat dan negara. *Kedua*, penggunaan modul bahasa Kafoa untuk kepentingan pembelajaran muatan lokal dan menjadi contoh dari sekolah-sekolah lain yang hendak memanfaatkan bahasa daerah setempat untuk muatan lokalnya. *Ketiga*, *affirmative action* yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Alor dengan mengeluarkan peraturan daerah tentang pelestarian bahasa dan budaya Alor secara umum. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan surat edaran Kepala Dinas Kabupaten Alor.

Tiga indikator keberhasilan penelitian pelestarian dan pemberdayaan bahasa dan budaya Kafoa di atas telah memungkinkan bahasa Kafoa dikenal dan dipelajari oleh banyak ilmuwan. Banyak peneliti bahasa di kantor bahasa Kupang dan Badan Bahasa yang hendak melakukan penelitian tentang bahasa Kafoa, baik dari sisi linguistiknya ataupun sosiolinguistiknya. Sementara itu, para mahasiswa dari Universitas

Indonesia dan Universitas Gadjah Mada sering berkomunikasi aktif tentang kemungkinan penelitian dan pemberdayaan bahasa Kafoa dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan contohnya untuk kasus-kasus kebahasaan lain. Demikian juga beberapa media televisi seperti Metro TV, Trans TV, dan TV One beberapa kali meliputi proses dan upaya pelestarian bahasa dan budaya Kafoa tersebut.

Jika indikator keberhasilan ini dilihat dari perspektif antropologi kebijakan, maka penelitian bahasa dan budaya Kafoa dapat dinyatakan berhasil. Artinya, penelitian yang dimaksud tidak sekadar membuahkan berbagai karya ilmiah, tetapi juga telah memicu tumbuhkembangnya kesadaran masyarakat, penguatan partisipasi, dan *affirmative action* dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa (i) teknisasi bahasa, (ii) politik, dan (iii) basis ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Chris & Shore (1997) dapat disatukan dalam penelitian yang menghasilkan politik kebijakan pelestarian bahasa dan budaya Kafoa.

Dalam konteks Kabupaten Alor, penelitian dan pemberdayaan bahasa dan budaya Kafoa mendapatkan tempat yang khusus. Ia menjadi semacam percontohan bagi bahasa daerah lainnya untuk segera mendapatkan perhatian atas keselamatan dan pelestariannya. Namun demikian, pertanyaan yang seringkali muncul dalam proses penelitian dan pemberdayaan bahasa dan budaya Kafoa adalah bagaimana pengembangan lebih lanjut pembelajaran bahasa dan budaya Kafoa melalui modul yang dibuat para peneliti sebelumnya? Apakah ada kendala yang menyulitkan pembelajaran bahasa Kafoa, dalam arti praktiknya? Apakah para penutur dan pemerintah daerah, khususnya lembaga-lembaga terkait, masih mau menindaklanjutinya dengan berbagai program pendukungnya? Apakah bahasa dan budaya Kafoa memiliki nilai-nilai strategis untuk menguatkan relasi antara warga masyarakat dan negaranya, sehingga konsepsi dan praktik persatuan di antara masyarakat dan negara dapat terwujud? Beberapa pertanyaan ini tentu didasarkan pada permasalahan dan fenomena yang terjadi bersamaan dengan implementasi kegiatan penelitian dan pemberdayaan bahasa dan budaya Kafoa.

Dalam implementasinya, seringkali dijumpai beberapa kendala, baik teknis ataupun substansi. Dalam hal teknis, terlihat bahwa persoalan utama pembelajaran bahasa dan budaya Kafoa atau

muatan lokal lainnya selalu terkait dengan aspek pembiayaan dan ketersediaan para pengajarnya. Sementara pada hal substansi dapat dinyatakan bahwa modul pembelajaran yang dibuat sebelumnya masih jauh dari sebuah dokumentasi lengkap mengenai bahasa dan budaya Kafoa. Ia bersifat sederhana, sehingga memungkinkan modulnya belum bisa mencakupi secara keseluruhan kebutuhan siswa terhadap kosakata, tata bahasa, dan nilai-nilai budaya Kafoa yang ada di sekitarnya.

Perlu disampaikan bahwa hal paling membedakan kegiatan penelitian bahasa dan budaya Kafoa dibandingkan dengan penelitian bahasa-bahasa Non-Austronesia lainnya, adalah perumusan dan penyusunan bahan pembelajaran Kafoa sebanyak dua jilid. Jilid pertama untuk kelas 2 sd. 3 SD, dan jilid kedua untuk kelas 4 sd 6 SD, yang keduanya juga bisa digunakan untuk pembelajaran di tingkat SMP. Modul pembelajaran yang disusun pada tahun 2014 sebelumnya menjadi salah satu indikator penting keberhasilan program prioritas nasional (PN 11), dan manfaat bagi masyarakatnya terlihat jelas pada proses penelitian DIPA tahun 2017 ini. Modul pembelajaran Kafoa yang disusun para peneliti, dan diawasi ketat pelaksanaannya oleh tetua adat di Habollat dan Lola telah menjadi contoh bagaimana upaya pelestarian bahasa dan budaya apapun tidak sekadar pada proses penelitian. Aspek pendampingan dan pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pendokumentasian dan pembelajarannya di tingkat implementasinya. Perencanaan bahasa (*language planning*) tidak hanya berorientasi pada hasil-hasil ilmiah belaka, tanpa pelibatan masyarakat untuk melestarikan bahasa di dalamnya.

Banyak aktivitas penelitian kantor bahasa dan Badan Bahasa, tetapi sifatnya lebih tertuju pada upaya pendokumentasian bahasa daerah. Sementara Badan Pelestarian Nilai Tradisional (BPNT) lebih bersifat pendokumentasian kekayaan budayanya saja. Proses pendokumentasiannya juga lebih menekankan pada tugas para peneliti dan hanya menjadikan kelompok masyarakat pelaku dan penuturnya sebagai informan yang dimintai keterangan kata dan maknanya. Ketika masyarakat sebatas menjadi objek penelitian, penelitian tersebut tidak akan menghasilkan penumbuhan kesadaran dan peningkatan partisipasi di tingkat masyarakat dari objek material penelitiannya.

Dengan melihat kelemahan model penelitian seperti itu, tim peneliti PN 11-LIPI untuk Kafoa mengambil inisiatif yang cukup berbeda dibandingkan yang lain. Tim berusaha melibatkan dua puluh orang tetua adat untuk bertemu, membahas, dan memberikan masukan dalam proses penyusunan modul pembelajaran. Ada empat kali pertemuan intensif yang dilakukan bersama, dan puluhan kali pertemuan dilakukan secara khusus kepada individu yang dianggap mampu memberikan sumbangan bagi kegiatan penyusunan modul. Pertemuan pertama dilakukan untuk membangun satu kesepahaman bersama tentang pentingnya modul tersebut, dan merumuskan tata urutan kurikulum pembelajarannya. Saat itu, banyak ide dan masukan yang memperkaya rencana modul pembelajaran yang akan disusun. Pada pertemuan kedua, setelah bahan rencana modul disusun sementara oleh tim, maka para tetua adat diminta mempelajarinya dan memberikan catatan penting. Pertemuan kedua ini untuk menjangkau alasan keberterimaan dan argumentasinya, sehingga modul ini bisa dikatakan sebagai kerja bersama antara masyarakat dan perwakilan negara (tim peneliti).

Bahan perbaikan kemudian menjadi bahan diskusi pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga inilah, perbaikan terus dilakukan untuk menata ulang kosakata, kalimat, dan substansi cerita yang wajib ada pada modul pembelajarannya. Akhirnya, pada pertemuan keempat, secara aklamasi para tetua adat menyetujui bahan modul pembelajaran yang sudah ditata ulang dan diperbaiki berdasarkan masukan dari semua orang yang terlibat. Pada pertemuan terakhir ini juga diberikan latihan dan metode pembelajaran yang dianggap cocok untuk tingkat dan sistem kebudayaan yang dikenal di masyarakat Kafoa. Keterlibatan tetua ada pada empat pertemuan formal dan disertai dengan puluhan pertemuan informal, tanpa biaya memadai, menjadi penanda bahwa mereka ingin terlibat dalam mengukir sejarah penyusunan modul pembelajaran bahasa Kafoa. Mereka telah mau mengartikan bahwa modul itu adalah bahan penting dari upaya pelestarian bahasa dan budaya Kafoa yang terancam punah itu.

Keterlibatan para tetua adat dan pemegang hak *kesulungan* dari keluarga-keluarga *fam* masyarakat Kafoa mengindikasikan adanya kesadaran tentang ancaman kepunahan bahasa dan budaya Kafoa itu. Dalam banyak kasus, mereka secara terbuka menyatakan bahwa anak-anak dan pemuda tidak lagi mengetahui banyak

kosakata bahasa dan memahami budaya Kafoa yang ada. Mereka juga tidak tahu tentang cara mengucapkan bahasa Kafoanya dengan benar, ataupun tidak tahu fase-fase tentang rangkaian tradisi budaya Kafoa dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka juga menyatakan secara terang-terang bahwa sebagian anggota masyarakat lainnya telah tidak mengerti nilai-nilai dan kebiasaan sosial budaya masyarakat Kafoa. Mereka tidak lagi tahu tentang asal-usul leluhurnya. Mereka tidak lagi mengerti tentang ritual persembahan batu hitam mesbah suci. Mereka tidak lagi mengerti tentang hubungan antar-*fam* dan pengakuan hak *kesulungan* pada masing-masing anggota *fam*-nya. Mereka juga tidak mengerti cara pembukaan lahan, dan ritual-ritual yang menyertainya. Mereka juga kurang paham harus bersikap bagaimana ketika berhadapan dengan ketua adat, keturunan *kapiten*, dan para orang tua dari berbagai *fam* keluarga, dan sebagainya.

Dengan kenyataan seperti itulah, mereka beranggapan bahwa modul pembelajaran bahasa yang di dalamnya sangat kental dengan nilai-nilai budaya Kafoa yang mampu memasuki dunia pendidikan dasar dan menengah pertama itu dapat kembali mengingatkan dan mengembalikan generasi muda orang Kafoa untuk mengerti adat istiadat, sistem sosial budaya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan orang Kafoa. Modul pembelajaran merupakan alat strategis pengetahuan kelompok generasi tua kepada generasi muda. Dibandingkan media lainnya, modul merupakan alat yang bersifat langsung menghujam ke dalam kemampuan kognisi dan afeksi anak-anak pelanjut tradisinya. Terlebih ketika modul pembelajaran ini dikemas secara menarik dengan gambar yang sesuai dengan pengalaman kebudayaan si anak, dan lekat dengan foto-foto lingkungan sekitarnya, maka hal tersebut telah mendekatkan bayangan sang anak kepada kondisi kebudayaan sekitarnya.

Apalagi pembelajaran bahasa dan budaya juga didukung metode pembelajaran modern, yaitu nilai baik sebagai *reward* dan nilai jelek sebagai *punishment*. Walaupun hal terakhir bukan tujuan utama dari penyusunan modul pembelajaran ini, tetapi setidaknya kompensasi nilai telah mengarahkan kemauan anak Kafoa untuk lebih mengerti dan memahami kebahasaan dan kebudayaannya. Modul pembelajaran akhirnya adalah proses perjumpaan dari sifat alamiah kebudayaan dengan skenario rekayasa untuk menanamkan nilai-nilai kebudayaannya yang

didasarkan pada kekuatan data etnografi bertahun-tahun. Hal ini tentu akan berimbang positif terhadap upaya pelestarian kekayaan kebudayaan kelompok primordialnya.

Sebagaimana ditulis Benedict Anderson tentang negara bangsa (2002) dan Kuasa Kata (2000) tentang politik nasionalis yang didorong kemajuan dalam media cetak, melalui tulisan, ide-ide nasionalisme disebarkan ke berbagai pelosok daerah dan dibaca oleh warga berbagai kelompok etnik, suku, bahasa, dan agama. Di dalam politik nasional juga termasuk di dalamnya kekayaan kebudayaan, proses integrasi, adaptasi, dan ikatan nasionalis kemudian menjadi elemen dari politik nasional. Politik nasionalisme akhirnya disemaikan, ditumbuhkan dan dikuatkan oleh media cetak yang isinya benar-benar dikemas dengan baik oleh para aktor nasional atau para perantara budaya untuk mentransmisikan ide nasionalisme itu agar diterima kepada khalayak umum. Dalam arti ini, media cetak memiliki peran strategis dalam mentransmisikan ide kebudayaan nasional ke kebudayaan lokal, dan demikian sebaliknya.

Jika proses transmisi politik nasionalisme yang menggunakan media cetak di atas diterapkan untuk kepentingan pelestarian budaya dan bahasa Kafoa serta proses transmisi lintas generasi, modul pembelajaran yang ditetapkan dalam dunia pendidikan merupakan sarana strategis untuk pengembangan kebudayaan lokal dan nasional di masyarakat Kafoa. Modul menjadi ibarat media cetak yang mampu menanamkan nilai kebudayaan yang hendak disampaikan dari para tetua adat kepada generasi muda. Melalui dunia pendidikan, modul itu akan diperhatikan secara seksama oleh siswa dan perangkat sekolah. Sistem ini akan berjalan dan berjalan selaras dengan penyampaian langsung oleh para tetua adat dalam berbagai forum pertemuan adat. Kepala sekolah SLTP Satap di Habollat pernah mengatakan sebagai berikut.

“Teman-teman LIPI benar-benar melakukan langkah strategis dalam upaya pelestarian bahasa dan budaya Kafoa di sini. Bahkan cara ini menjadi pembicaraan terus menerus di antara kepala sekolah di berbagai wilayah yang memiliki suku dan bahasa yang berbeda. Mereka cemburu kenapa wilayahnya tidak serta diteliti oleh para peneliti LIPI itu. Mereka ingin dibuatkan modul pembelajaran untuk SD dan SMP, sehingga nilai-nilai kebudayaan dan kosakata kebahasaan itu tidak hilang di kalangan anak-anak itu.

Modul dalam dunia pendidikan adalah jiwanya pendidikannya. Ketika teman-teman di LIPI telah menggenggam jiwanya, maka seluruh perangkat di dalamnya akan mengikuti apa yang hendak diarahkan oleh jiwa itu” (Wawancara dengan Marthinus, Kepala SLTP Satap, 2 Mei 2017).

Pernyataan di atas mengandung makna tentang politik kebudayaan yang cukup kuat dari sebuah modul pembelajaran yang disusun oleh tim peneliti (bersama masyarakat yang diwakili para tetua adat). Modul itu ibarat jiwa dalam dunia pendidikan (mungkin jiwa pembelajaran, maksudnya) menjadi catatan tersendiri untuk direnungkan. Apa yang dinyatakan oleh kepala sekolah itu tidaklah mengada-ada, karena modul memang menjadi alat pandu dalam kegiatan belajar dan mengajar. Seorang guru membutuhkan panduan saat mengajar siswanya. Demikian juga ketika siswa belajar selalu membutuhkan panduan untuk mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Modul dibuat berdasarkan segala pengetahuan yang hendak disampaikan oleh si pembuatnya. Beberapa pertimbangan substansi dan teknis selalu menyertai dalam proses pembuatan modul.

Oleh karena itu, maka untuk kepentingan pelestarian bahasa dan budaya Kafoa, maka modul itu pun diisi oleh pesan-pesan penting tentang khazanah kebudayaannya. Kosakata, tata bahasa, dan latihan yang diselengi oleh cerita dan pepatah yang dikenal dalam kebudayaan masyarakat Kafoa menjadi pesan khusus untuk disampaikan dalam proses pembelajaran itu. Pesan-pesan seperti inilah yang diilustrasikan pula dalam “politik nasionalisme” sebagaimana yang ditulis oleh Anderson di atas. Akhirnya, melalui modul pembelajaran dalam aktivitas belajar mengajar di dunia pendidikan itulah potensi pelestarian kebudayaan masyarakat Kafoa akan terjamin keberlanjutannya dari sekarang, sampai di kemudian hari.

Akhirnya, modul pembelajaran rupanya menjadi media penting dalam “transmisi kebudayaan” dari generasi sebelumnya kepada generasi muda. Bahkan, ia tidak hanya mampu merevitalisasi atau melestarikan bahasa dan pengetahuan budaya sebagaimana bahan ajar yang ditetapkan, tetapi juga mendorong kebudayaan dan bahasa lain untuk tampil dalam proses pembelajarannya. Jika hal ini diteruskan, maka penguatan kebudayaan lokal di Alor, sebagaimana yang diharapkan dalam Peraturan Bupati Alor No. 29 Tahun 2015 tentang

kurikulum muatan lokal satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di kabupaten Alor yang dihubungkan dengan sistem pendidikan nasional akan dapat tercapai.

## Penutup

Penelitian etnografi bahasa dan budaya bukan sekadar dimengerti sebagai pendokumentasian dan proses pelestarian kekayaan bangsa. Penelitian yang menjadikan bahasa dan budaya sebagai objek material, mau tidak mau, akan menggali seluruh aspek kehidupan terkait pada praktik kebudayaan, tradisi, nilai-nilai kepercayaan, sejarah asal usul, pandangan dunia, etos, mata pencarian, jaringan kekerabatan dan sebagainya. Selain itu proses hibriditas kebudayaan atau ambang batas kebudayaan dari berbagai jejaring kebudayaan yang bertemu pun dibaca secara komprehensif. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan proses dan dampaknya pada masing-masing kebudayaan suku bangsanya.

Aspek-aspek kesukubangsaan di atas pada akhirnya menjadi sangat strategis untuk menjadi rujukan dari sebuah proses mitigasi pencegahan konflik, peredaman atau resolusi konflik, dan bahkan sebagai basis dari upaya penguatan rajutan kebangsaan yang ada. Penelitian etnografi pada bidang kajian budaya memungkinkan aspek-aspek emik yang seringkali dilupakan akan diangkat sebagai sebuah perspektif dan refleksi dalam merencanakan dan mewujudkan rencana-rencana pembangunan yang berhubungan dengan suatu komunitas atau beberapa komunitas lainnya. Perspektif ini akan memudahkan tingkat keberterimaan masyarakat dalam menghadapi berbagai kebijakan yang ada.

Penelitian etnografi bahasa dan budaya yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan, misalnya, telah menemukan aspek-aspek kebudayaan penting dalam upaya pencegahan konflik di satu sisi, dan di sisi lain ia adalah bagian penting dari pelestarian kekayaan budaya bangsa. Modul kebahasaan Kafoa misalnya menjadi wajahrupa berbagai nilai budaya yang digali secara etnografi dan kemudian dikemas pada sebuah kumpulan bahasa yang aplikatif. Melalui modul ini pula, pemerintah daerah Kabupaten Alor pun kemudian tergerak untuk mengembangkan upaya pelestarian bahasa dan budaya daerah Alor dalam sistem pendidikannya. Hal ini menjadi *affirmative action* dari temuan-temuan data penelitian

etnografi yang diungkap secara mendalam dan komprehensif.

Demikian pula pertemuan antara para peneliti etnografi dengan masyarakat sebagai subjek penelitiannya, juga telah memungkinkan tumbuhnya kesadaran dan meningkatnya partisipasi mereka dalam proses pelestarian khazanah kebudayaan yang ada. Selain itu, adanya rasa kebanggaan suku bangsa yang menjadi bagian penting dari sebuah bangsa besar akan muncul bersamaan dalam sebuah proses penelitian. Proses seperti ini menjadi aspek penting dari penumbuhan rasa cinta dan kesadaran berbangsa di tengah keragaman berbagai kelompok bangsa yang lain. Akhirnya, penghargaan atas usaha negara dalam melindungi kekayaan suku bangsanya dan kebanggaan menjadi bagian dari sebuah bangsa, akan menjadi modal sosial penting yang bisa dikapitalisasikan untuk kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa.

## Daftar Pustaka

- Aditjondro, George Junus. (2007). "Mengawal Perdamaian Di Wilayah-wilayah Rawan Konflik". Dalam Tim Peneliti. (2007). *Laporan Penelitian Konflik dan Resolusi Konflik*. Ambon: STAIN Ambon.
- Anderson, Benedict. (2002). *Imagined Communities (Komunitas-komunitas Terbayang)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist.
- (2000). *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Anwar, Dewi Fortuna, dkk. (2007). *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bourdieu, Pierre. (1993). *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature* Pierre Bourdieu, Randal Johnson [ed]. Columbia: Columbia University Press.
- Boudrialliard, Jean. (1998). *The Consumer Society: Myths and Structure*. London: Sage.
- Crystal, David. (2000). *Language Death*. Australia: Cambridge University Press.
- Firmansyah. (2014). Mengurai Konflik Lampung. Dalam *Jurnal Politik*. Vol. VI, edisi 1.
- Fishman, Joshua A. (1989). *Language and Ethnicity in Minority Sociolinguistic Perspective*. Clevedon: Multilingual Matters.

- Fromkin, Victoria dan Rodman, Robert. (2003). *An introduction to Language: Seventh Edition*. USA: Thomson Wadsworth.
- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. DIY: Pustaka Pelajar.
- Grimes, Charles E. dan Therik M.Th, Tom. (1997). *A Guide to the People and Language of Nusa Tenggara*. Kupang: Artha Wacana.
- Haidhar, Amin dan Lalu M. Fahmi. (2017). *Nasionalisme dan keagamaan di Tapal Batas: Kasus Merauke Papua*. Jakarta: Puslitbangbimas Kementerian Agama.
- Hanafî, Hassan. (2000). *Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Tradisi Barat, Pengantar Oksidentalisme*. Jakarta: Paramadina.
- Haugen, Einar. (2001). "The Ecology of Language" dalam Alwin Fill & Peter Muhlhausler. *Ecolinguistics Reader: Language, Ecology and Environment*. London: Continuum.
- Hikam, Muhammad AS. (2016). "Nasionalisme dalam Bentangan Keanekaragaman Budaya. Sebuah Catatan Pengantar". Dalam *Catatan Pembahasan*. Jakarta: P2KK LIPI.
- Hisyam, Muhamad, dkk. (2011). *Pemertahanan Bahasa Pagu*. Jakarta: PMB LIPI & PT Gading Inti Prima.
- Hoed, Benny H. (2011). "Ekologi Bahasa, Revitalisasi Bahasa, Identitas dan Tantangan Global dalam Masyarakat Indonesia yang Multikultural" *Prosiding Diskusi Pengembangan dan Perlindungan Bahasa-Kebudayaan Etnik Minoritas untuk Penguatan Bangsa* pada tanggal 15 Desember. Jakarta: LIPI.
- Humaedi, M. Alie. (2013). "Ekpresi Kebudayaan Masyarakat Penutur Bahasa Kafoa di Habollat Alor Barat Daya." M. Alie Humaedi. *Mereka yang Melupakan Mutiaranya: Dari Studi Ekologi ke Pemertahanan Bahasa Kafoa di Alor, NTT*. Jakarta: LIPI Press.
- (2013). "Memaknai Wasiat (*Woum*) sebagai Kearifan Budaya Kafoa" dalam *Jurnal Sejarah dan Nilai Tradisional, BSNT Bali dan Nusa Tenggara*, Vol. XI, No. 1, Maret.
- (2014), *Mekanisme Internal Pelestarian Bahasa & Budaya Kafoa*. Jakarta: LIPI.
- (2015). "Antara yang Lemah dan Mereka yang Berani: Assesment Penyebab Konflik Balinuraga Lampung". Jakarta: HFI dan UNOCHA.
- (2017). *Etnografi Pengobatan: Sejarah dan Falsafah Pengobatan Masyarakat Adat Tau Taa Vana*. Yogyakarta: LKiS.
- Klinken, Gerry van. (2007). *Perang Kota Kecil*. Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara.
- Lauder, Multamia RMT. (2011). "Pengelolaan dan Pemberdayaan Bahasa yang Berpotensi Terancam Punah." *Prosiding Seminar Pengembangan dan Perlindungan Bahasa-Kebudayaan Etnik Minoritas untuk Penguatan Bangsa*. 15 Desember. Jakarta: LIPI.
- Liliweri. (2008). *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- LIPI dan Centre for Humanitarian Dialogue. (2011). *Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku: Papua dan Poso*. Switzerland: HDCentre.
- Malik, Ichsan. (2008). *Pembangunan Perdamaian dan Pencegahan Konflik: Manual Pelatihan*. Jakarta: Canadian International Development Agency bermitra dengan Transparency International Indonesia.
- Masnun, Leolita dan Soewarsono. (2013). *Revitalisasi Budaya & Bahasa Oirata di Pulau Kisar, Maluku Barat Daya, Maluku*. Jakarta: PMB LIPI & PT Gading Inti Prima.
- Mufid, Ahmad Syafii (ed). (2012). *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Meyerhoff, Miriam. (2006). *Introducing Sociolinguistics*. NY: Routledge.
- Patji, Abdul Rachman. (2013). "Migrasi Masyarakat Kafoa di Moru, Kalabahi, dan Kupang". M. Alie Humaedi (ed.). *Mereka yang Melupakan Mutiaranya: Dari Studi Ekologi ke Pemertahanan Bahasa Kafoa di Alor, NTT*. Jakarta: LIPI Press.

- Patji, Abdul Rachman (2012). *Bahasa dan Kebudayaan Etnik Minoritas: Vitalitas dan Kemungkinan Pemertahanannya (Policy Paper)*. Jakarta: PMB, IPSK, LIPI.
- (2015). *Bahasa, Kebudayaan, & Pandangan tentang Kebahasaan Masyarakat Etnik (Lokal) Kafoa di Alor Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: LIPI Press.
- Said, Edward, W. (1993). *Culture and Imperialisme*. Kairo: Chatto & Windus.
- Sallabank, Julia. (2011). "Language Policy for Endangered Languages", dalam Peter K. Austin & Sallabank (Ed.), *The Cambridge Handbook for Endangered Languages*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sapir, Edward. (2001). "Language and Environment" dalam Alwin Fill & Peter Muhlhausler (Ed). *The Ecolinguistics Reader: Language, Ecology and Environment*. London and New York: Continuum.
- Schiffman, Harold. (2006). "Language Policy and Linguistic Culture", dalam Thomas Ricento (Ed). *An Introduction to Language Policy, Theory and Method*. Malden, Oxford, Carlton: Blackwill Publishing Ltd.
- Setara Institute. (2012). *Akar Konflik dan Upaya Peredamannya: Sebuah Kaleidoskop Tahunan*. Jakarta: Setara Institute.
- Wahyu, Setiawan. (2014). "Peran Tokoh Agama Hindu dalam Penyelesaian Konflik Balinuraga". Dalam *Jurnal Akademika*, Vol XII, No. II, STAIN Metro.
- Shore, Cris dan Susan Wright. (1997). *Anthropology of Policy: Critical Perspectives on Governance and Power*. London: Routledge.
- Skutnabb-Kangasi. (1999). *Language, a Right and a Resource: Approaching Linguistic Human Rights*. Leiden: Central European University Press.
- Subagya, Rachmat. (1981). *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Sudiyono. (2013). "Penguasaan Ranah Penggunaan dan Transmisi Bahasa". M. Alie Humaedi (ed.). *Mereka yang Melupakan Mutiaranya: Dari Studi Ekologi ke Pemertahanan Bahasa Kafoa di Alor, NTT*. Jakarta: LIPI Press.
- (2015). "Beilel: Sejarah Kepunahan Suatu Suku bangsa". Dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol. XVII, No. 3. Jakarta: PMB LIPI.
- Sukmawati, Anggy Denok. (2016). "Sistem Kekerabatan Bahasa Dayak Sontas". Laporan Penelitian. Jakarta: PMB LIPI.
- Syafii, Imam. (2013). "Dari Selat Menuju Samudra Luas: Rivalitas Pengangkutan Garam 1912–1980". *Tesis Magister Sejarah Universitas Diponegoro*.
- Tomagola, Thamrin Amal. (2006). "Mengurai Konflik Tidak Berkesudahan" dalam *Opini Kompas*, 12 Desember.
- (2006). *Republik Kapling*. Yogyakarta: Resist Book.
- Tumanggor, Rusmin. (1999). "Sistem Kepercayaan dan pengobatan Tradisional: Studi Penggunaan Ramuan Tradisional dalam pengobatan Masyarakat Barus Sukubangsa Batak Tapanuli Sumatera Utara". *Disertasi*. Jakarta.
- Turangan, Lyli, Willyanto, dan Reza Fadhilla. (2014). *Seni Budaya dan Warisan Indonesia Jilid 8 Bahasa dan Sastra*. Jakarta: PT Aku Bisa.
- Wahid Institute. (2014). *Membaca Akar Kekerasan di Indonesia*. Jakarta: Wahid Institute.
- Waileruny, Samuel. (2011). *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*. Jakarta: Obor.
- Wakano, Abidin. (2007). *Ambon: Kontestasi Suku bangsa Atas Nama Agama. Sebuah Laporan Ringkas*. Jakarta: Laporan Ornop.
- Widhyasmaramurti. (2013). "Kafoa sebagai Identitas Bangsa". M. Alie Humaedi (ed.). *Mereka yang Melupakan Mutiaranya: Dari Studi Ekologi ke Pemertahanan Bahasa Kafoa di Alor, NTT*. Jakarta: LIPI Press.

#### Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

**Website**

*http://www.ethnologue.com/bibliography.asp*,  
diakses 10 Desember 2017.

*http://www.joshuaproject.net/countries.php?rog*  
3, diakses 10 Desember 2017.

*www.sastradaerah.usu.ac.id.*, diakses tanggal 15  
Desember 2017.

